



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 421 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN KERJA
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) huruf e dan g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran pada SKPD dan SKPKD untuk menyelenggarakan penatausahaan keuangan pada SKPD dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 70* Seri A Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 63 Seri A Nomor 52);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA :/

KEDUA

: Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan tanggungjawab:

1. Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, bendahara penerimaan SKPD berwenang :
 1. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
 2. menyimpan seluruh penerimaan;
 3. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja;
 4. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank.
- c. Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar secara geografis sehingga wajib pajak dan/atau wajib retribusi mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya, dapat ditunjuk satu atau lebih bendahara penerimaan pembantu SKPD untuk melaksanakan tugas dan wewenang bendahara penerimaan SKPD.
- d. Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dan mempertanggungjawabkan secara fungsional kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- e. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- f. Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis terhadap laporan pertanggungjawaban penerimaan bendahara penerimaan pembantu.

2. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) :

- a. Mengajukan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
- b. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.

- c. Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan mempertanggungjawabkan secara fungsional kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- d. Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- e. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurangnya (1) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- f. Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis terhadap laporan pertanggungjawaban pengeluaran bendahara pembantu.
- g. Memungut PAD dan menyetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

3. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

- a. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) mengelola pengeluaran belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
- b. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPK-SKPKD).
- c. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- d. Mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPK-SKPKD).

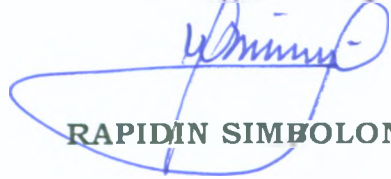
KETIGA : Untuk penatausahaan penerimaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah seperti penerimaan dana perimbangan, penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan penerimaan pembiayaan daerah dilaksanakan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah.

KEEMPAT :...../

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Inspektur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Balige;
7. BRI Cabang Balige di Balige;
8. PT. Bank Sumut Cabang Pangururan di Pangururan;
9. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja se-Kabupaten Samosir;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 421 TAHUN 2019
TANGGAL : 31 DESEMBER 2020
TENTANG : PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA
PENGELUARAN PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DAN SATUAN
KERJA PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2020

BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	Christin Yosephin Simbolon, A.Md Pengatur Tk.I (II/d) NIP. 19821111 201504 2 001	Staf pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir	Bendahara Penerimaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten
2.	Sylvia F.A Rajagukguk, S.Sos Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19790823 201101 2 008	Staf pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir	Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten
3.	Yusri M. Simbolon, S. IP Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19850426 200502 2 001	Staf pada Sekretariat DPRD Kabupaten Samosir	Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Samosir
4.	Juni I. Silalahi Pengatur (II/c) NIP. 19840614 201001 2 037	Staf pada Badan Pendapatan Daerah	Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah
5.	Merlina Simbolon Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 19820226 200604 2 021	Staf pada Badan Pendapatan Daerah	Bendahara Pengeluaran pada Badan Pendapatan Daerah
6.	Elvita Pandiangan, A.Md Penata Muda (III/a) NIP. 19880307 201101 2 012	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir	Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir
7.	Defhi Bonarysa Ayu Samosir, A.Md Penata Muda (III/a) NIP. 19880626 201101 2 018	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir	Bendahara Pengeluaran SKPKD yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan pembiayaan pada SKPKD
8.	Agnes SS Lumbangaol, A.Md Penata Muda (III/a) NIP. 19881016 201101 2 008	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bendahara Pengeluaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

9.	Ampe Tua Sihombing, AMd Penata Muda (III/a) NIP. 19751013 201408 1 002	Staf pada Inspektorat Daerah Kabupaten	Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir
10.	Jojo Parulian Sianturi, A.Md Penata Muda (III/a) NIP. 19861114 200904 2 006	Staf pada Badan Kepegawaian Daerah	Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian Daerah
11.	Reboinden K. Sitanggang Pengatur (II/c) NIP. 19830225 200906 1 001	Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa
12.	Rebeka M.Simbolon, A.Md Pengatur (II/c) NIP. 19880323 201504 2 003	Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Bendahara Penerimaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
13.	Desi Yanti Lumban Tobing, A.Md Penata Muda (III/a) NIP. 19851215 201001 2 041	Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
14.	David Lavlase Simanjuntak, A.Md Penata Muda (III/a) NIP. 19820624 201101 1 005	Staf pada Dinas Ketahanan Pangan	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Ketahanan Pangan
15.	Elprida Sitohang, A.Md Penata Muda (III/a) NIP. 19831013 200904 2 006	Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bendahara Penerimaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16.	Daniel Erikson Pasaribu, A.Md Penata Muda (III/a) NIP. 19830702 201001 1 023	Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17.	Lungguk M. Hutasoit, A.Md Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 19861116 201101 1 002	Staf pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Bendahara Penerimaan pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
18.	Irawati Teresia Sitanggang, S.Kom Penata Muda, (III/a) NIP. 19840404 201504 2 001	Staf pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
19.	Ida Poltak Januarita Tampubolon Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 19820123 201101 2 006	Staf pada Dinas Pariwisata	Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata
20.	Dedi Lumbanraja, A.Md Pengatur Tk.I (II/d) NIP. 19870616 201101 1 012	Staf pada Dinas Pariwisata	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pariwisata
21.	Bastian Simanjuntak, S.Kom Penata Muda (III/a) NIP. 197911162015041001	Staf pada Dinas Perhubungan	Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan

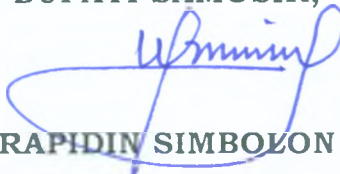
22.	Minta Natalia Nadeak Pengatur (II/c) NIP. 19851023 201001 2 040	Staf pada Dinas Perhubungan	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan
23.	Rani Silitonga, A.Md Penata Muda (III/a) NIP. 19870309 201101 2 017	Staf pada Dinas Pertanian	Bendahara Penerimaan pada Dinas Pertanian
24.	Mornauli Sudianna Malau Pengatur Muda Tk. I (II/b) NIP. 19810306 201504 2 001	Staf pada Dinas Pertanian	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian
25.	Betty F.A. Purba, A.Md Pengatur Tk.I (II/d) NIP. 19870823 201101 2 018	Staf pada Dinas Lingkungan Hidup	Bendahara Penerimaan pada Dinas Lingkungan Hidup
26.	Samuel Larry Hoffmann Simamora, SE Penata Muda Tk. I, III/b NIP. 198108042011011005	Staf pada Dinas Lingkungan Hidup	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup
27.	Riama Veronika Br Sinaga Penata Muda (III/a) NIP. 19860627 200904 2 003	Staf pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Bendahara Penerimaan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
28.	Yan Junjungan Sidabutar Pengatur (II/c) NIP. 19830124 200903 1 003	Staf pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
29.	Merlina Simbolon Pengatur (II/c) NIP. 19870221 201001 2 001	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bendahara Penerimaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
30.	Risro Asima Naibaho, Amd Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 19850418 201101 2 016	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
31.	Parhitean Naibaho Pengatur (II/c) NIP. 19770307 200801 1 001	Staf pada Dinas Pendidikan	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan
32.	Murni Sibuea, SKM Penata Muda (III/a) NIP. 19760201 200904 2 004	Staf pada Dinas Kesehatan	Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan
33.	Bohal Parulian Gurning Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19771201 200604 1 002	Staf pada Dinas Kesehatan	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan
34.	Sri Rosliana Hutabarat Penata Muda (III/a) NIP. 19771108 201001 2 016	Staf pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga	Bendahara Penerimaan pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga
35.	Asima Haryani Sinaga Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19791225 200604 2 010	Staf pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga	Bendahara Pengeluaran pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga
36.	Melaty R. Juniarty Sitanggung Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19870617 201101 2 023	Staf pada Dinas Sosial	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial

37.	Desriani K. Simaremare, A.Md Pengatur Tk.I (II/d) NIP. 19791228201101 2 008	Staf pada Dinas dan Komunikasi Informatika	Bendahara Penerimaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika
38.	Issadora Masda Simbolon, Amd Penata Muda (III/a) NIP.19830525 201001 2 035	Staf pada Dinas dan Komunikasi Informatika	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika
39.	Elena Tamba, A.Md Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 19810620 201408 2 005	Staf pada Dinas dan Perpustakaan Arsip Daerah	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
40.	Hernayanti Naibaho Penata Muda (III/a) NIP. 19830303 201001 2 017	Staf pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
41.	Mariska EF. Malau Pengatur (II/c) NIP. 19791026 200801 2 004	Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja	Bendahara Pengeluaran pada Satuan Polisi Pamong Praja
42.	Sudiber Halomoan Sinaga Pengatur (II/c) NIP. 19850924 201001 1 004	Staf pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
43.	Kristina Asri, A.Md Pengatur Tk.I (II/d) NIP. 19921102 201504 2 001	Staf pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
44.	Seblon P. Naibaho Penata Muda (III/a) NIP. 19841018 201001 1 028	Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
45.	Toba Sinaga Pengatur Muda Tk.I (II/b) NIP. 19640520 198602 1 003	Staf pada Kantor Camat Simanindo	Bendahara Penerimaan pada Kantor Camat Simanindo
46.	Floren N.V Sidabutar Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 19861116 201101 2 012	Staf pada Kantor Camat Simanindo	Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Simanindo
47.	Siska Endang Samosir Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 19860924 201001 2 028	Staf pada Kantor Camat Pangururan	Bendahara Penerimaan pada Kantor Camat Pangururan
48.	Artauli Sitanggang Pengatur Tk.I (II/d) NIP. 19700622 200701 2 019	Staf pada Kantor Camat Pangururan	Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Pangururan
49.	Lybertus Sinaga Pengatur (II/c) NIP. 19660808 198909 1 001	Staf pada Kantor Camat Palipi	Bendahara Penerimaan pada Kantor Camat Palipi
50.	Olwin Andrea Manullang Pengatur (II/c) NIP. 19811119 200903 1 006	Staf pada Kantor Camat Palipi	Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Palipi
51.	Hisar Parhusip Pengatur (II/c) NIP. 19781202 200906 1 001	Staf pada Kantor Camat Nainggolan	Bendahara Penerimaan pada Kantor Camat Nainggolan

52.	Bongguk E. Sitohang, A.Md Penata Muda (III/a) NIP. 19880717 201101 1 005	Staf pada Kantor Camat Nainggolan	Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Nainggolan
53.	Desprianti Tarigan, A.Md Penata Muda (III/a) NIP. 19791208 201101 2 008	Staf pada Kantor Camat Onan Runggu	Bendahara Penerimaan pada Kantor Camat Onan Runggu
54.	Lister Sitinjak Pengatur (II/c) NIP. 19740410 200906 1 002	Staf pada Kantor Camat Onan Runggu	Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Onan Runggu
55.	Elfrida Simbolon Pengatur (II/c) NIP. 19830118 200903 2 006	Staf pada Kantor Camat Ronggur Nihuta	Bendahara Penerimaan pada Kantor Camat Ronggur Nihuta
56.	Bintar Situmorang Pengatur (II/c) NIP. 19831022 201001 1 012	Staf pada Kantor Camat Ronggur Nihuta	Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Ronggur Nihuta
57.	Armat Sagala Pengatur (II/c) NIP. 19631231 2007011 428	Staf pada Kantor Camat Sianjur Mula- mula	Bendahara Penerimaan pada Kantor Camat Sianjur Mula-mula
58.	Kasran Siboro Pengatur (II/c) NIP. 19790331 200906 1 001	Staf pada Kantor Camat Sianjur Mula- mula	Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Sianjur Mula-mula
59.	Lince Sinurat Pengatur (II/c) NIP. 19740614 200906 2 001	Staf pada Kantor Camat Harian	Bendahara Penerimaan pada Kantor Camat Harian
60.	Torang Tamba, A.Md Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 19810929 200701 1 003	Staf pada Kantor Camat Harian	Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Harian
61.	Rajo Sinaga Pengatur (II/c) NIP. 19630421 200701 1 017	Staf pada Kantor Camat Sitio-tio	Bendahara Penerimaan pada Kantor Camat Sitio-tio
62.	Uluan H. Rajagukguk Pengatur (II/c) NIP. 19721024 201001 1 004	Staf pada Kantor Camat Sitio-tio	Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Sitio-tio

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON